



SOCIAL ECONOMIC CHANGE AND ALLEVIATION OF VULNERABLE SMALL FARMERS THROUGH THE SOCIAL SAFETY NETS ASSISTANCE DURING THE COVID19 PANDEMIC

PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DAN PENGENTASAN PETANI KECIL RENTAN MELALUI BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID19

Roosganda Elizabeth

BRIN/Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

E-mail: roosimanru@yahoo.com

Diterima tanggal 29 Mei 2022, disetujui tanggal 7 Juni 2022

ARTICLE INFO

Correspondent:

Roosganda Elizabeth
roosimanru@yahoo.com

Key words:

unemployment, small farmers, vulnerable, cohesion and social solidarity

Website:

<http://idm.or.id/JSCR>

page: 1 - 15

ABSTRACT

The ongoing COVID-19 epidemic has had a profound impact on the socio-economic life of the community and the country. With the cessation of various businesses (companies) due to the increasingly limited marketing of their products, resulting in a reduction in the workforce, causing increased unemployment. The Social Safety Net (JPS) is one of the government assistance policy programs for business/working capital. This paper aims to describe qualitatively and conceptually various obstacles in the distribution of JPS for vulnerable small farmers, enriched by various other related literature reviews. The occurrence of various socio-economic changes in the wider community. The JPS program is implemented by the government, although it is accompanied by interventions to ensure the smooth implementation of its distribution and is maintained with social cohesion and solidarity, which is accompanied by public solidarity. The need to empower and increase social cohesion and solidarity as well as become a tool of social control, accompanied by altruism values that grow in society. The Covid-19 pandemic should have become a momentum that has a broad and multi-dimensional impact, where by relying solely on market mechanisms it will be difficult to make a recovery.

Copyright © 2022 JSCR. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden Roosganda Elizabeth <i>roosimanru@yahoo.com</i></p> <p>Kata kunci: pengangguran, petani kecil, rentan, kohesi dan solidaritas sosial</p> <p>Website: <i>http://idm.or.id/JSCR</i></p> <p>hal: 1 - 15</p>	<p>Epidemi COVID19 yang tak kunjung berakhir sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi-sosial masyarakat dan negara. Dengan terhentinya berbagai usaha (perusahaan) karena semakin terbatasnya pemasaran produknya, sehingga terjadi pengurangan tenagakerja, menyebabkan semakin meningkatnya pengangguran. Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan salah satu program kebijakan bantuan pemerintah untuk modal usaha/kerja. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan secara deskriptif kualitatif dan konseptual berbagai kendala dalam penyaluran JPS untuk petani kecil rentan diperkaya dengan berbagai review literatur terkait lainnya. Terjadinya berbagai perubahan sosial ekonomi di masyarakat luas. Program JPS dilaksanakan pemerintah, meski disertai intervensi untuk kelancaran pelaksanaan penyalurannya dan terpelihara dengan kohesi dan solidaritas sosial, yang disertai solidaritas publik. Perlunya memberdayakan dan meningkatkan kohesi dan solidaritas sosial serta menjadi alat kontrol sosial, disertai nilai-nilai <i>altruisme</i> yang tumbuh di masyarakat. Sudah seharusnya pandemi Covid-19 menjadi suatu momentum yang berdampak luas dan multi dimensi, dengan mengandalikan mekanisme pasar semata akan sulit untuk melakukan <i>recovery</i>.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2022 JSCR. All rights reserved.</i></p>

PENDAHULUAN

Di masa pandemi Covid-19 (disebabkan virus corona SARS-CoV-2), situasi dan kondisi yang serba tidak menentu (baca: kepanikan), pertahanan keamanan pangan, ketahanan dan tatanan kehidupan sosial membutuhkan perhatian yang lebih serius. Berbagai dampak epidemi Covid-19 juga terhadap kehidupan ekonomi-sosial masyarakat dan negara, seperti meningkatnya pengangguran dan kesulitan ekonomi akibat terputusnya sumber matapencaharian untuk menyambung hidup. Pemerintah dalam penanganan Covid-19, menyatakan bahwa episentrum sebelumnya berpusat di daerah perkotaan, kini terus menyebar ke daerah lain dan dikhawatirkan menjadi episentrum baru. Berbagai upaya teknis, sosial dan ekonomis dalam mengatasi pandemi Covid-19 juga harus didukung dengan penguatan sosial ekonomi semua lapisan masyarakat (terutama petani kecil). Petani kecil (dan masyarakat golongan menengah ke bawah) adalah kaum rentan karena berbagai keterbatasannya. Menurut IAASTD (*International Assessment of Agricultural Knowledge, Science & Technology for Development*, 2008) adalah karena pemerintah seringkali terlupa (keliru) dalam mengurus sektor pertanian skala kecil dan petani kecil, menjadi akar terdalam krisis pangan.

Epidemi Covid-19 juga memukul berbagai lapangan usaha dalam negeri (sector: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum) dengan ditetapkannya pembatasan social dan pengaturan bergantian jadwal kehadiran pegawai bekerja. Dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai salah satu program kebijakan bantuan yang bergerak di aras sosial dan lebih mengarah ke ranah bantuan ekonomi (modal usaha/kerja), merupakan upaya pemerintah dalam mengatasinya. Pemahaman dasarnya merupakan suatu analogi yang membantu ketika kondisi sulit si penerima supaya keberlanjutan penghidupannya dapat berjalan dengan baik. JPS bukan bantuan untuk bangkit kembali, tapi sokongan pencegahan sebelum mati karena tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup.

Pelaksanaan penyaluran JPS ditenggarai dapat terpelihara dengan kohesi dan solidaritas sosial dan publik, dan dioptimalkan sampai ke masyarakat lapisan bawah. Dengan penguatan kohesi dan solidaritas sosial, setiap warga negara jadi memiliki kesadaran, kepedulian, dan kepercayaan baik pada pemerintah maupun antar masyarakat guna mendukung keberhasilan program pemerintah dalam mengatasi berbagai kesulitan di masa pandemi Covid-19. Untuk itu, tulisan ini bertujuan membahas apa dan bagaimana kebutuhan terhadap program JPS untuk menghadapi tekanan pandemi Covid-19, khususnya petani kecil dan masyarakat menengah ke bawah yang rentan; efektivitas JPS sebagai program penanganan pandemi Covid-19; peran dan kebutuhan terhadap program JPS; prospek dan efektivitas penerapan JPS di masa pandemi Covid-19; perubahan sosial di masa Covid-19. Dengan demikian, program JPS merupakan keniscayaan yang harus dijalankan pemerintah, meski disertai intervensi demi kelancaran implementasinya.

METODE PENELITIAN

Berbagai upaya secara simultan dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi berbagai situasi, masalah dan kendala yang dihadapi semua lapisan masyarakat terutama petani kecil dan golongan menengah ke bawah yang rentan terdampak pandemi Covid-19. Secara deskriptif kualitatif tulisan ini bertujuan mengemukakan akselerasi penyaluran jaring pengaman sosial mendukung pengentasan kerentanan petani kecil dan terjadinya perubahan sosial di masa pandemi covid-19 menguraikan secara. Untuk memperkaya cakupan tulisan, dilakukan review berbagai data informasi dan literatur terkait meliputi: apa itu petani kecil, apa dan bagaimana urgensi dan kebutuhan petani kecil dan masyarakat yang rentan terdampak terhadap program JPS, terkait: efektivitas dan prospek penerapan program JPS di masa pandemi Covid-19, serta perubahan social di masa Covid-19. JPS, merupakan salah satu dari berbagai program kebijakan bantuan yang dicanangkan pemerintah terhadap para korban yang terdampak kesulitan. JPS, merupakan bantuan non-kontribusi yang di sektor pertanian adalah untuk meningkatkan kehidupan petani kecil yang rentan karena berbagai keterbatasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Covid-19 (disebabkan virus Corona SARS-CoV-2) semakin luas, baik secara global dan nasional sudah di tingkat pandemi karena begitu cepat dan masif. WHO (11/3/2020) menyatakan sebagai bencana non-alam global. Terkait dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang

membagi bencana menjadi bencana alam, non-alam, dan social, terbit Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Wabah Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non-alam Nasional. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Sejak pemerintah pertama kali mengkonfirmasi wabah Covid-19 tanggal 2 Maret 2020, kasus orang terpapar dan meninggal terus bertambah dan meningkat secara signifikan dan sudah menyebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia, meski jumlah korban yang sembuh juga meningkat. Peningkatan yang terpapar secara eksponensial menunjukkan bahwa belum terjadinya kurva pelandaian seperti pernah diprediksi, yang mengindikasikan bahwa pandemi Covid-19 tidak bisa disikapi secara permisif. Perlunya dilakukan langkah sistematis, terukur, dan komprehensif dalam aspek penanganannya. Petani kecil, masyarakat miskin, kaum rentan, dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi Covid-19.

URGENSI JPS BAGI PETANI KECIL SEBAGAI KAUM RENTAN

1. Pengertian Petani, Esensi Dan Karakteristik Petani Kecil

Dalam berbagai literatur, dikenal konsep umum petani (farmer) sebagai pelaku usahatani sebagai sumber matapencahariannya. Di Indonesia (dokumen resmi) tidak dikenal petani besar dan petani kecil petani, tetapi pembedaan atas komoditas yang diusahakan. Pembedaan atas petani pangan, petani kebun, peternak, dan seterusnya, tidak berkaitan dengan atribut sosial ekonomi dan politiknya, yang bertujuan memudahkan pemerintah untuk menentukan sasaran dan kegiatan program kebijakan pembangunan pertanian. Peasant (subsistence farmer) merupakan petani yang sesungguhnya, yang dalam kesehariannya mengerjakan sendiri setiap tahapan usahatani (mengolah tanah hingga panen), meskipun berada pada level bawah. Bagi petani yang hanya menyediakan tenaga kerja disebut dengan farmhands, growers sebagai buruh tanpa lahan, dan sharecroppers atau sharefarmers adalah para petani penyakap. Small farmer adalah petani berlahan sempit (smallholder), tenant farmer (penyakap), atau peasant, dengan jenis petani lain misalnya entrepreneurial and large scale corporate. Peasant dan farmer memiliki perbedaan konotasi dan atribut, dimana peasant gambaran petani subsisten (petani kecil), penyewa (*tenants*), penyakap (*sharecroppers*), dan buruh tani, sedangkan farmer adalah petani modern bertujuan agribisnis yang menerapkan teknologi modern berbasis jiwa bisnis.

Keberadaan petani kecil ini semakin penting bagi dunia. Pertanian skala kecil lebih mampu beradaptasi dan pejal, sekaligus model keberlanjutan yang ramah kearifan lokal dan keragaman hayati, termasuk untuk menghadapi perubahan iklim (Altieri, 2008). Berbagai hasil riset menunjukkan pertanian kecil jauh lebih produktif dari pertanian industrial karena mengonsumsi sedikit input terutama bahan bakar minyak (Rosset, 1999). Ciri umum peasant adalah sikap kerjasama antar peasant, usahatani skala kecil, menggunakan tenaga kerja dalam keluarga, mengutamakan pemenuhan konsumsi sendiri (Stefan, 1997). Karena berskala kecil (*small scale*) dan lebih intensif, lahan ditanami berbagai tanaman/tumpang sari (*intercropping*), dan sudah mulai penanaman tanaman baru sebelum panen selesai.

IP lahan bisa lebih dari 500 persen dalam setahun, terutama pada usahatani palawija dan hortikultura.

Oleh karena itu, memperhatikan pertanian skala kecil tidak hanya memberi pangan dunia, tetapi juga menyelesaikan kemiskinan dan kelaparan. IAASTD (2008) menyimpulkan bahwa model pertanian ekspor-industrial-monokultur bukan mengatasi kemiskinan dan kelaparan, malah merusak lingkungan (air dan tanah), menggerus keanekaragaman hayati dan kearifan lokal (olah tanah, pola dan waktu tanam, pengendalian HPT), dan menyebabkan kerentanan. Petani harus dipahami dalam konteks sebagai individu, keluarga dan komunitas, karena di masa pandemi Covid-19 memiliki dampak berbeda pada ketiga level tersebut, yang akan berbeda pula dalam menyusun strategi penanggulangan dampaknya. Sedangkan dari sisi komunitas, petani diorganisasikan dalam garis keorganisasian wilayah (dusun, kampung dan desa); dan juga keorganisasian formal petani (kelompok tani, gapoktan, dll).

Dalam pengertian teknis, produksi berarti proses memadu (menggunakan) faktor-faktor produksi untuk menghasilkan sesuatu (produk usahatani). Dalam pengertian ekonomis, produksi berarti pekerjaan yang menghasilkan/berguna/kegunaan, memperbesar guna tersebut dan membagikan kepada orang banyak. Petani dalam melakukan proses produksi secara teknis didasarkan kemampuannya menggunakan faktor-faktor produksi dengan segala usaha/ tindakan sehingga diperoleh/menghasilkan produk bernilai ekonomis dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Secara komersil, suatu proses produksi sebagai usaha/kerja yang bertujuan memperoleh pendapatan/keuntungan sebesar-besarnya dengan mengefektifkan pengalokasian sumber-sumber produksi yang dikuasai, supaya diperoleh pendapatan maksimum.

2. Urgensi JPS bagi Petani Kecil Di Masa Covid 19

Pemahaman umum petani tentang Covid-19 adalah penyakit pernafasan dengan gejala berupa batuk berat, flu, cepat menyebar dan bahkan dapat menyebabkan kematian, namun masih ada petani di pelosok belum tahu tentang Covid-19. Terjadinya perubahan perilaku petani (92%) dengan melakukan protokol kesehatan: cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ada lima tantangan utama yang dihadapi petani di masa pandemi mencakup keseluruhan sistem produksi sampai distribusi dan konsumsi, agar layak hidup yang baik, yaitu: (i) tenagakerja upahan terbatas dan mahal; (ii) pupuk subsidi terbatas; (iii) akses informasi terbatas; (iv) kesulitan penjualan hasil pertanian; (v) turunnya harga komoditas. Mengurangi orang berkumpul maka kegiatan kelompok tani sudah jarang diadakan, beberapa diskusi dilakukan melalui *WhatsApp group*. Terganggunya memperoleh informasi pertanian karena petugas lapang dan penyuluh dari perusahaan swasta tidak lagi mengunjungi desa mereka. Mengurangi frekuensi keluar rumah, maka waktu membeli input dan menjual hasil panen berkurang. Perubahan modal pertanian karena kenaikan harga input pertanian sekitar 10%-75% (pupuk naik Rp1500/kg, pestisida naik Rp5000-8000/paket di Purworejo, JaTeng; benih padi naik dari Rp15000/kg menjadi Rp25000/kg di Lombok Tengah, NTB; buruh tani naik menjadi Rp100000/hari di Lombok Timur, NTB).

Terhambatnya beberapa distribusi pupuk subsidi (Ponska dan SP36) ke desa, namun tidaklah sulit bagi beberapa petani yang biasa menggunakan benih retain dan kompos. Beberapa petani tidak/mengurangi jasa buruh tani luar lokasi terkait resiko penularan, sehingga waktu kerja dan panen menjadi lebih lama karena tidak serentak dilakukan. Petani beralih menggunakan mekanisasi (alsintan) dan berbagi dengan petani lain. Selain faktor cuaca dan ketersediaan air beberapa perubahan jadwal tanam mulai terjadi, perubahan permintaan pasar akan merubah komoditas dan rotasi tanam yang cepat untuk menghasilkan uang, perubahan luas tanam sekitar 25%-50%. Petani merasa harga komoditas padi, jagung, cabai dan sayur-mayur turun kecuali bawang merah, dan kegiatan penjualan terganggu karena PSBB pasar sudah mulai tutup, petani mencari pasar lain sambil menunggu panen. Petani menggunakan Internet untuk mendapatkan informasi pertanian dan aktifitas lainnya.

Agenda penting yang dapat dijalankan sebagai instrumen penanggulangan dampak, yaitu: (1) mencegah dampak utamanya pada kesehatan dan produksi pangan; dan (2) strategi penanggulangan ke depan yang mencakup proses pemulihan dan akselerasi. Di masa pandemic Covid-19, dampak yang dirasakan petani berkenaan dengan posisi sebagai produsen sekaligus konsumen. Potensi kemampuan petani melawan dampak pandemi sangat lemah terutama pada rumah tangga petani kecil (diartikan miskin). Menurunnya aktivitas dan anjloknya harga komoditas akan menekan pendapatan, akan memperlemah ketahanan pangan, kecukupan gizi dan kesehatan. Terlebih bagi petani miskin di kelompok/komunitas yang didominasi keluarga miskin berdampak lebih berat dibanding petani miskin di kelompok masyarakat berpendapatan sedang; yang disebabkan semakin menurunnya kapasitas kesetiaan kolektif dan lemahnya kemampuan komunitas dalam melakukan local innovate untuk melakukan resiliensi kolektif. Ada program yang dapat diberikan langsung kepada individu, dan juga ada yang bersifat barang publik (public good) yang efektif bila dimanfaatkan bersama, misalnya bantuan alsintan pada kelompok tani. Untuk itu, penanganan dampak pandemi untuk petani dapat dilakukan pada dua level dampak yakni program-level impact yang terjadi di level individu, dan population-level atau community-level impact.

Untuk itu, dibutuhkan JPS di tengah kesulitan yang juga dihadapi petani kecil di masa Covid 19 sebagai bantuan ekonomi (modal) untuk berusahatani guna menghasilkan pendapatan. JPS disiapkan menyokong dan menopang kaum rentan petani kecil, bukan untuk bangkit kembali, melainkan sebagai pencegahan sebelum mati karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup meskipun membutuhkan intervensi pemerintah melalui pihak terkait, baik di hulu sampai di hilir. JPS di sektor pertanian meliputi berbagai bantuan nonkontribusi untuk meningkatkan kehidupan petani kecil dan individu rentan terdampak karena berbagai keterbatasannya (bahkan dapat diartikan sebagai kemiskinan atau kemelaratan).

Berikut rincian tiga kegiatan JPS khususnya yang terkait dengan petani, pertanian dan masyarakat yang rentan: Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan sebulan sekali. Selain itu, nilai manfaat yang diterima masyarakat juga akan dinaikkan 25 persen. Pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari PKH, dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta. Mulai pertengahan April, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sudah mencairkan bansos

PKH setiap bulan hingga Desember 2020, dengan total anggaran Rp37,4 triliun. Kedua, Program Kartu Sembako. Penerima manfaat program ini dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta orang dengan nilai Rp200 ribu per bulan, juga akan diberikan sampai Desember 2020. Kemensos menganggarkan kartu sembako Rp43,6 triliun. Program ini naik 20 persen dari Rp150 ribu menjadi 200 ribu untuk 20 juta orang yang dikucurkan setiap bulan. Untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan dana Rp25 triliun untuk operasi pasar dan logistik. Ketiga, Program kartu prakerja, dimana anggaran yang awalnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk penerima manfaat 5,6 juta orang, terutama pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak pandemi. Nilai manfaat kartu prakerja Rp650 ribu sampai Rp1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan. Tenaga kerja pertanian atau buruh tani semestinya bisa menjadi peserta program ini. Peserta prakerja (formal/informal) terdampak Covid 19 mendapatkan bantuan pelatihan dan insentif Rp3.550.000. Rinciannya, bantuan pelatihan Rp1 juta, insentif sesudah pelatihan Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei Rp150.000 per peserta. Pelatihan digelar secara daring.

Menghadapi pola pandemi Covid-19, berbeda dengan tekanan sosial sebelumnya, maka dibutuhkan rancangan dan bentuk program JPS yang juga berbeda. Oleh karena itu, pemberian JPS sebagai bantuan dan dukungan untuk kaum rentan seperti petani kecil dan pelaku pertanian lain beserta keluarga serta masyarakat golongan menengah ke bawah perlu dilakukan secara tepat agar efektif, meskipun belum ada definisi konsep yang tepat dan terpadu, namun keberhasilan efektivitas penyaluran JPS tercermin pada: tidak boleh ada kehilangan nyawa karena tidak makan, harus mampu memberi perlindungan sosial dan secara ekonomi mampu memberikan keselamatan hidup minimum tertentu. Dengan kata lain, untuk mengikis kemiskinan, kelaparan, dan degradasi lingkungan, disarankan hendaknya akselerasi dalam memperkuat pertanian skala kecil dan meningkatkan investasi pertanian agroekologis, memberi perhatian pada: pendapatan dan kesejahteraan petani kecil, kearifan lokal, membalik akses dan kontrol sumber daya (air, tanah, dan modal) dari korporasi ke komunitas lokal, serta memberdayakan dan memperkuat organisasi tani. (catatan: pemahaman kohesi sosial dan korporasi dikemukakan pada artikel lainnya).

PROSPEK PENERAPAN JPS SEBAGAI PROGRAM PENANGANAN PANDEMI COVID19

1. Kebutuhan JPS Sebagai Program Penanganan Pandemi Covid-19

Hal terpenting saat ini bukan hanya mengatasi bencana virus Covid-19 saja, namun upaya akurat untuk membentuk sistem pertahanan dan keamanan nasional di masa pandemic hingga pasca pandemic mendatang. Masyarakat Indonesia sebenarnya sangat beruntung karena memiliki kohesi dan solidaritas sosial yang sangat kuat berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal tersebut semestinya dijadikan momentum untuk menyadari perlunya pemahaman mitigasi bencana sebagai Kesiapsiagaan Bencana di semua aspek terutama dalam pelaksanaan penyaluran JPS. Badan atau lembaga pelaksana penyaluran JPS perlu dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan baik dalam satu komando sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam hal data. Ketidakterersediaan dan lemahnya kohesi dan solidaritas sosial dalam kelembagaan pelaksana penyaluran dan implementasi

JPS adalah merupakan kerapuhan yang berperan besar dalam mengganjal implementasi bantuan untuk pengembangan perekonomian pedesaan (terutama petani kecil dan pertanian skala kecil). Jika sistem penyaluran program dibiarkan rapuh, maka program pengembangan teknologi, inovasi dan investasi apapun tidak akan mampu menjadi “mesin penggerak” ekonomi yang tangguh.

Pemerintah menyediakan dana sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan wabah Covid-19. Salah satu bentuknya adalah program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan menyediakan dana Rp110 triliun, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Presiden menekankan tiga hal dalam pelaksanaan program JPS, yaitu: tepat sasaran, sesegera mungkin, dan mekanisme penyalurannya seefisien mungkin, yang disertai kesesuaian prosedur, kesesuaian dan kecukupan volume/besaran bantuan JPS tersebut. Ada tujuh bentuk kegiatan dalam program jaring pengaman sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu, dan bantuan sosial khusus wilayah Jabodetabek.

2. Prospek Penerapan JPS di Masa Pandemi Covid-19

Program JPS harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan dan dampak pandemi Covid-19. Upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca-Covid-19, anggaran pemerintah mencanangkan Rp641,17 triliun, naik dua kali lipat (Rp318,09 triliun). PEN terbagi empat komponen, yaitu: belanja negara Rp427,46 triliun, pembiayaan Rp133,51 triliun, tambahan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp65,1 triliun, dukungan pemerintah daerah (Pemda) Rp15,1 triliun. Dari jumlah anggaran di atas, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk dukungan konsumsi baik berupa bantuan sosial (bansos) maupun subsidi sebesar Rp172,1 triliun, yang mencakup perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Diskon Tarif Listrik, Bansos Jabodetabek, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, dan bantuan berupa pangan atau sembako. Pemerintah juga menganggarkan Rp34,15 triliun dialokasikan untuk subsidi bunga pada pelaku UMKM. MenKeu, Sri Mulyani menyebutkan dengan prediksi berat, tahun ini pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 2,35%, bisa negatif -0,4% dengan skenario sangat berat. Angka kemiskinan diprediksi akan bertambah sekitar 1,1 juta-3,78 juta orang kondisi terburuk. Menurut KADIN jumlah terkena PHK sekitar 6 juta orang, menurut Kemenaker sekitar 1,7 juta orang, menurut BAPPENAS sekitar 2 juta sampai 3,7 juta orang, dan akan munculkan barisan baru kemiskinan (Menteri PPN/Kepala BAPPENAS).

Jaring Pengaman Sosial (JPS) telah disiapkan pemerintah guna membantu masyarakat terdampak Covid-19. Mulai dari bantuan tunai, sembako, sampai subsidi listrik bagi 24 juta pelanggan 450 Va. “Bantuan (JPS) ini untuk masyarakat menengah lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok. Serta menjaga daya beli mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran pandemi ini,” (Menko. Bidang Perekonomian, di akun Instagram, Minggu (24/5/2020). Terdapat sedikitnya tujuh program pemerintah dalam program JPS. Untuk lebih rincinya, berikut diuraikan rinciannya:

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH).. PKH yang biasanya diberi tiga bulan sekali, kini akan diberi sebulan sekali. Nilai manfaat yang diterima masyarakat dinaikkan 25%. Dana anggaran program PKH sebesar Rp37.4 triliun.

- 2) Kartu Sembako. Ada 20 juta keluarga penerima manfaat kartu ini. Nantinya, jenis bantuan yang sudah menggunakan anggaran Rp43,6 triliun akan dibagikan Rp200 ribu per bulan, selama 12 bulan ke masing-masing penerima.
- 3) Bantuan Sosial Sembako. Selama April – Juni 2020, total anggaran ini sejumlah Rp3.42 triliun diluar penerima PKH atau kartu sembako. Target sasaran penerima bansos ini hingga 1,3 juta keluarga untuk DKI Jakarta, serta 600 ribu keluarga untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- 4) Bantuan Sosial Tunai. Diberikan selama tiga bulan dengan indeks bantuan Rp600 ribu per bulan per keluarga. Kata Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, penerima bantuan ini adalah mereka yang belum menerima bansos PKH, BPNT, atau kartu pra kerja. Para penerima bantuan ini adalah seluruh keluarga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data tambahan dari pemda yang selama ini tak pernah menerima bansos.
- 5) Bantuan Langsung Tunai. Sama seperti skema bansos tunai, para penerima BLT akan dapat dana Rp600 ribu per bulan per keluarga. Total anggaran bantuan ini Rp21,2 triliun yang menyasar ke 20 juta penerima.
- 6) Subsidi Listrik. Bagi pelanggan 450 VA, tarif listrik digratiskan selama tiga bulan ke depan. Jumlahnya mencapai 24 juta pelanggan. Sementara, untuk 900 VA dipangkas biaya pemakaian listriknya hingga 50 persen. Kebijakan ini berlaku bagi 7 juta pelanggan.
- 7) Kartu Prakerja. Penyaluran kartu ini ditargetkan dimulai sejak April lalu. Kata Presiden, target utama penyaluran kartu ini adalah masyarakat terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja, pekerja informal dan pelaku UMKM terdampak Covid-19. Total anggaran untuk program ini Rp20 triliun. Masing-masing penerima dapat Rp600 ribu dan selama 4 bulan.

TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DI MASA COVID 19

Pernyataan Pemerintah tentang kasus pertama positif Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia, muncul kepanikan massal di hampir semua kalangan masyarakat. Konten pemberitaan terkait pandemi Covid-19 dari framing media massa dikonstruksi secara sensasional semakin menonjolkan sisi eksploitatif dalam bentuk komodifikasi melalui narasi-narasi dari berita yang ditampilkan, dengan tujuan mendapat perhatian public. Kondisi tersebut menimbulkan efek sosial berupa kepanikan moral di tengah masyarakat, yang pada gilirannya menyebabkan perubahan kognitif, sistem kepercayaan, dan sikap khalayak karena diterima melihat kebenaran informasi tersebut menyebabkan kepanikan berlebihan. Kepanikan massal kemudian ditandai dengan aksi sporadis pemborongan masker, hand sanitizer, dan Alat Pelindung Diri (APD) lainnya yang ketersediaannya semakin langka dan cukup mahal. Dengan keluarnya berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari karantina rumah sakit, karantina mandiri, dan lain sebagainya hingga PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020. Seluruh kebijakan politik yang diputuskan oleh baik pemerintah Pusat maupun Daerah harus diiringi dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tinggi untuk menaatinya, karena pandemi yang melanda dunia ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat, tanpa kecuali. Pelaksanaan kebijakan PSBB tersebut bukanlah hal yang mudah dan menuai berbagai protes dan kritik yang mengaitkannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam situasi tersebut, justru lebih menimbulkan berbagai sikap, seperti: curiga, prasangka, dan bahkan

menimbulkan dampak kecemburuan sosial yang dengan sangat mudah untuk di mobilisir.

Undang Undang No. 12 Tahun 2005, oleh negara Indonesia, hak asasi manusia terdiri dari dua jenis. Hak Asasi Manusia: Pertama, yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh siapapun termasuk negara dan dengan alasan apapun (*Non-Derogable Rights*), yang tidak boleh dikesampingkan dan atau ditunda karena bersifat absolute, yaitu: hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang, hak bebas dari pidana yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama. Kedua, yang dapat dikesampingkan pemenuhannya (*Derogable Rights*) karena ada yang lebih besar kepentingannya, yakni perlindungan atas hak asasi masyarakat yang lebih luas; seperti: kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat atau (baik lisan maupun tulisan). Dengan demikian PSBB dan larangan mudik pada waktu lebaran termasuk hak asasi yang dapat dikesampingkan mengingat tujuan pemerintah memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Upaya sosialisasi di berbagai lini harus berpatokan pada semangat dan aksi gotong-royong serta sikap dan tindakan empatik.

Semua elemen masyarakat bahu-membahu turut membantu (uang, barang) bagi terdampak langsung-tidak langsung, dengan apresiasi tinggi, mencerminkan kohesi dan solidaritas sosial yang tinggi dan sangat responsif. Perhatian dan menginfokan golongan yang membutuhkan bantuan (JPS) merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Francis Fukuyama mendefinisikan JPS sebagai rangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama di antara mereka.

JPS, dapat tersalurkan dengan saling menginformasikan golongan yang membutuhkannya, perilaku yang bisa disebut suatu tindakan altruisme, yaitu semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain. Di masa Covid-19 ini, tercermin banyak perilaku dan tindakan altruisme dan heroik yang dilakukan oleh para tenaga medis (dokter dan perawat) berjibaku hingga tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia. Demi kesembuhan warga masyarakat yang terpapar Covid-19, mereka mengorbankan tenaga, waktu, keluarga, dan bahkan nyawa. Kisah altruisme juga banyak dilakukan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok (organisasi maupun komunitas). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, penguatan kohesi sosial melalui pemberdayaan solidaritas masyarakat penting dalam pencegahan penyebaran virus corona yang semakin masif ini. Kekuatan kohesi dan solidaritas sosial telah terbukti dalam menghadapi dan mempercepat pemulihan bencana alam dan nonalam.

Penguatan sosial ekonomi di masa Covid-19 merupakan bagian dari kehidupan sosial, jaringan, norma, dan kepercayaan serta kehidupan ekonomi yang mendorong tumbuhnya partisipatif dari semua aspek masyarakat yang diharapkan dapat membentuk kohesi sosial secara lebih efektif bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, nilai-nilai altruisme yang tumbuh dan berkembang selama ini di masyarakat harus dihidupkan kembali yang dapat memperkuat kohesi sosial masyarakat. Kohesi sosial merupakan solidaritas sosial berperan sangat penting dalam menjaga kohesi antarwarga dan menjadi alat kontrol sosial. Pandemi Covid-19

telah membawa berbagai dampak yang luas dan multi dimensi, sehingga mekanisme-mekanisme normal yang biasa dilakukan misalnya mengandalkan mekanisme pasar sulit untuk melakukan recovery. Dengan momentum pandemic Covid-19 ini, pikiran, sikap, dan tindakan sekretarian harus dicegah supaya tidak direproduksi secara terus-menerus. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah juga secara simultan harus didukung dengan kohesi sosial yang di miliki oleh masyarakat itu sendiri.

Namun di tengah tingginya solidaritas masyarakat, muncul kecenderungan low trust masyarakat terhadap elite. Fukuyama mengatakan trust adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dimiliki ikut memperkuat rasa kebersamaan. Masyarakat yang high trust adalah masyarakat yang memiliki solidaritas sangat tinggi dan mau bekerja mengikuti aturan. "Tersebar luasnya ketidakpercayaan akan membebani seluruh aktivitas ekonomi masyarakat itu", terjadi karena nilai-nilai dan norma-norma untuk kejahatan ipso facto, yang merepresentasikan ketiadaan kohesi dan solidaritas social tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap norma komunitas/masyarakat. Sangat disesalkan/prihatin di tengah derita masyarakat terdampak, ditemukan sejumlah elite menyalahgunakan bansos untuk kepentingan pribadi/politik.

Keharusan untuk mengisolasi diri dari dunia luar dan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi ini mempengaruhi tingkat kekhawatiran masyarakat. Kondisi ini diprediksi akan mempengaruhi kesehatan mental (dan sosial) setiap individu. Pandemi Covid19 adalah telah merupakan suatu momentum yang sudah menyebabkan berbagai perubahan (tatanan social, ekonomi, dan budaya) bagi masyarakat, yang juga telah membuat perubahan besar dan menciptakan ketidakpastian, maupun keselarasan di kehidupan bermasyarakat yang menghasilkan keberlanjutan kohesi dan solidaritas social dalam menghadapi suatu kondisi yang sulit dan bermasalah untuk mampu menanganinya secara bersama. Nilai-nilai dan norma-norma yang menghasilkan kohesi dan solidaritas sosial harus secara substantif memasukkan nilai-nilai kejujuran, pemenuhan tugas, dan kesediaan untuk saling menolong.

PENUTUP

Pandemi COVID19 menyebabkan perbedaan pengeluaran dari kondisi biasa. 56% responden mengalami peningkatan pengeluaran, 44% mengalami peningkatan pengeluaran untuk bahan makanan dan suplemen kesehatan yang paling dominan (25%-50%), yang terkait anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dan meningkatkan imunitas tubuh dengan memasak makanan sendiri serta meningkat 31% aktivitas belanja online-nya. Pola konsumsi masyarakat selama pandemi ditunjukkan melalui tren global memasak dan makan di rumah. Dengan berkumpulnya keluarga di rumah, tingkat belanja makanan baik bahan mentah maupun makanan siap konsumsi, tingkat ketaatan terhadap himbauan dan protokol kesehatan dan pencegahan penularan oleh setiap individu menjadi lebih tinggi..

Pandemi Covid-19 telah membawa berbagai dampak luas dan multi dimensi, sehingga mekanisme-mekanisme normal yang mengandalkan mekanisme pasar misalnya sulit untuk melakukan recovery. Penyaluran program JPS harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi tekanan dan dampak social ekonomi pandemi Covid-19. Urgensi, kebutuhan dan efektifitas penyaluran JPS didasari pemahaman dasarnya

suatu analogi berlanjutnya kehidupan dengan baik, bila ada sumber penghasilan (termasuk bantuan) yang siap menopang dan menyokong keberlanjutan penghidupan terutama di kondisi dan situasi tidak berpenghasilan. Pemberian JPS bagi petani kecil (dan masyarakat menengah ke bawah) rentan terdampak perlu dilakukan secara tepat agar efektif, terkait perannya sebagai produsen sekaligus konsumen yang penanganannya yang dapat bermanfaat langsung bagi kelanjutan kehidupan keluarga, usahatani dan komunitasnya (individu level *impact* dan *population/community-level impact*).

Menurunnya kapasitas kesetiaan kolektif dan lemahnya kemampuan komunitas dalam melakukan local innovate untuk melakukan resiliensi kolektif, mengakibatkan semakin beratnya beban petani kecil di masa pandemic Covid-19. Menghadapi pola pandemi Covid-19 berbeda dengan pola tekanan sosial sebelumnya, maka dibutuhkan rancangan dan bentuk program JPS yang juga berbeda. Keberhasilan dalam pelaksanaan ketujuh kegiatan program JPS, harus didasari tepat sasaran, sesegera mungkin, dan mekanisme penyalurannya seefisien mungkin.

Pandemi Covid-19 telah membuat perubahan besar dan menciptakan ketidakpastian di kehidupan masyarakat, dimana keharusan untuk mengisolasi diri dan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi mempengaruhi tingkat kekhawatiran (kesehatan dan ekonomi) diprediksi akan mempengaruhi kesehatan mental (dan sosial) setiap individu. Memelihara kohesi sosial di tengah pandemi Covid-19, kohesi dan solidaritas sosial berperan sangat penting dan menjadi alat kontrol sosial. Selain itu, nilai-nilai altruisme yang tumbuh dan berkembang selama ini di masyarakat harus dihidupkan kembali sebagai solidaritas sosial yang dapat memperkuat kohesi sosial masyarakat.

Dengan momentum pandemik ini, solidaritas sosial mampu digerakkan dan diperkuat sehingga penyaluran JPS optimal. berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 juga harus didukung dengan kohesi dan solidaritas sosial dan publik yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Setiap warga negara juga secara simultan harus memiliki kesadaran, kepedulian, dan kepercayaan baik kepada pemerintah maupun antar masyarakat guna mendukung keberhasilan mengatasi pandemi Covid-19.

SIMPULAN DAN SARAN

- Wabah pandemi Covid-19 harus dipercaya keberadaan dengan tidak terprediksinya jangka waktu untuk pemulihan kenormalan kondisi dan situasi.
- Pertahanan keamanan pangan, kehidupan dan ketahanan sosial membutuhkan perhatian yang lebih serius di masa oleh virus corona SARS-CoV-2 yang serba tidak menentu seperti sekarang ini.
- Program JPS merupakan keniscayaan yang harus dijalankan pemerintah, meski disertai intervensi dalam kelancaran pelaksanaan penyalurannya.
- Terjadinya berbagai Perubahan Sosial, ekonomi dan budaya terkait peran JPS di masa Covid-19
- Perlunya memberdayakan dan meningkatkan kohesi dan solidaritas sosial yang sangat penting dalam menjaga kohesi antarwarga dan menjadi alat kontrol sosial, disertai nilai-nilai altruisme yang tumbuh dan berkembang selama ini di

masyarakat harus dihidupkan kembali sebagai solidaritas sosial yang dapat memperkuat kohesi sosial masyarakat.

- Perlunya penyaluran JPS di masa pandemi Covid-19 yang pelaksanaannya terpelihara dengan kohesi dan solidaritas sosial, yang disertai solidaritas public.
- Perlunya JPS yang disiapkan menyokong dan menopang kehidupan terutama petani kecil dan masyarakat golongan menengah ke bawah yang rentan karena berbagai keterbatasannya, bukan untuk bangkit kembali, melainkan sebagai pencegahan sebelum terancam kehidupan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- Sudah seharusnya pandemi Covid-19 menjadi suatu momentum telah membawa berbagai dampak yang luas dan multi dimensi. Sehingga, mekanisme-mekanisme normal yang misalnya mengandalkan mekanisme pasar sulit untuk melakukan *recovery*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiyer, S., A. Parker and J. V. Zyl. 1995. *The Myth of Large-Farm Superiority AGR Dissemination Notes*. No. 6 (August 1995) <http://www-wds.worldbank.org/.....>
- Altieri, M. A. 1995. *Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture*. Boulder: Westview Press.
- Amaluddin, M. 1987. *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial: Studi Kasus di Desa Bulugede, Kendal, Jawa Tengah*. UI-Press, Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 2020*. BPS. Jakarta
- Elizabeth. R, Iwan S.A. 2020. Akselerasi Hilirisasi Produk Agroindustri Berdayasaing Mendongkrak Kesejahteraan Petani Dan Ekonomi Pedesaan. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. Vol 6, No 2 (2019): Juli 2020. Fak. Pertanian Univ. Galuh. Ciamis. Jawa Barat.
- Elizabeth. R. 2019. Peningkatan Daya Saing Tanaman Pangan Melalui Akselerasi Agroindustri Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pertanian. **Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis**. Vol 5, No 2 (2019): Juli 2019. Akreditasi Nomor [34/E/KPT/2018](#) at [SINTA 4](#) (S4) rank. Accreditation is valid from December 10, 2018 to December 10, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/ma.v5i2.2411>
- Elizabeth. R. 2017. Revitalisasi Industri Produk Olahan Dan Pemberdayaan Lembaga Kemitraan Mendukung Peningkatan Pemasaran, Daya Saing Dan Kesejahteraan Petani Pisang. *Journal of Agricultural Sciences*. UNES. (Universitas Ekasakti). Padang Sumatera Barat. Volume 2. Issue 1. June 2017. ISSN Cetak: 2528-5556. ISSN Online: 2528-6226.
- Elizabeth. R. 2017a. Akselerasi Pemberdayaan Dan Peningkatan Kompetensi Dalam Sistem Produksi Untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi di Indonesia. Volume 2. Issue 1. June 2017. ISSN Cetak: 2528-5556. ISSN Online: 2528-6226.
- Eg Peter Hazell, January 2005. *Is there a Future for Small Farms?* *Agricultural Economics*, Vol. 32, pp93-101. doi:10.1111/j.0169-5150.2004.00016.

- Fatma Gül Ünal, October 2006. *Small Is Beautiful: Evidence of Inverse Size Yield Relationship In Rural Turkey Policy Innovations*.
http://www.policyinnovations.org/ideas/policy_library/data/01382
- Francis Fukuyama. 2002, Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Penerbit Qalam, DIY.
- Francis Fukuyama. 2014. *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*. Penerbit Qalam. DIY
- Monbiot, G. 2008. *Peasant Farmers Offer the Best Chance of Feeding the World*. So why do we treat them with Contempt? The Guardian, 10 June 2008.
- Mubyarto dan A. Santosa. 2003. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan: Kritik terhadap Paradigma Agribisnis. Artikel dalam Majalah Ekonomi Rakyat Th. II No. 3, Mei 2003. (http://www.ekonomirakyat.org/edisi_15/artikel_7.htm, 29 September 2020).
- PRISMA. 2020. Dampak Covid-19 di Pertanian – Perspektif Petani. Studi kualitatif terkait perubahan perilaku petani karena COVID-19 di empat provinsi target kerja PRISMA. 29 April 2020. Field Update 1 Farmers Behaviour Change A qualitative study regarding farmers behavior during Covid19 Pandemic. Kementerian PPN/BAPENAS. Australian Government.
- Rosset, P.M. *The Multiple Functions and Benefits of Small Farm Agriculture in the Context of Global Trade Negotiations*. By Ph.D. September 1999. Food First/The Institute for Food and Development Policy Oakland, CA USA. <http://www.foodfirst.org/node/246>.
- Soekartawi. Sebuah Catatan Tentang Definisi Petani Besar Dan Kecil. Lektor Madya pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Syahyuti. 2013. Pemahaman Terhadap Petani Kecil Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian. Forum Agro Ekonomi. Vol.31 No.1 Juli 2013:15-29. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. Kementerian Pertanian. Jakarta
- Syahyuti. 2012. Kelemahan Konsep dan Pendekatan dalam Pengembangan Organisasi Petani: Analisis Kritis terhadap Permentan No. 273 tahun 2007. Analisis Kebijakan Pertanian Vol .10 No.2 tahun 2012.
- Syahyuti. 2012. 35 tahun Berkarya untuk Petani: Sinopsis Penelitian PSE-KP periode 1976-2010. IAARD Press.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1984. *Social Organization and Planned Development in Rural Java: A Study of the Organizational Phenomenon in Kecamatan Cibadak, West Java and Kecamatan Kendal, Central Java, Singapore: Oxford University Press*.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1999. Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa. Dalam buku Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hal. 22.
- World Bank. 2008. World Development Report: Agriculture for Development.
<https://www.beritasatu.com/politik/628877-penyalahgunaan-bansos-untuk-kepentingan-politik-marak-terjadi>
<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429062046-20-498263/calon-episentrum-corona-baru-semarang-surabaya-dan-makassar>

<https://nasional.kontan.co.id/news/pengangguran-akibat-COVID-19-bisa-melebihi-hitungan-pemerintah>

<https://nasional.kontan.co.id/news/pengangguran-akibat-COVID-19-bisa-melebihi-hitungan-pemerintah>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5011381/phk-tak-terbendung-bahaya-gelombang-kemiskinan-baru>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200519/9/1242697/anggaran-pemulihan-ekonomi-nasional-naik-2-kali-lipat-untuk-apa>

<https://money.kompas.com/read/2020/05/19/063600726/anggaran-pemulihan-dampak-pandemi-naik-jadi-rp-641-17-triliun-ini-rinciannya?page=all>